

## Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Budaya Sekolah

Azhar Sulistiyono

SD Negeri Singopadu 2

Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Indonesia

Email : [azharssty@gmail.com](mailto:azharssty@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this reserch is provide an overview of the teacher's role in learning democratic values in elementary school culture in Sidoharjo, Sragen district. The method used in this study was obtained through qualitative descriptive data reduction, data presentation, and conclusion drawing which was carried out in sixth grade elementary schools where researchers collected data through observation, interviews and documents. As a result, the teacher's role is very important, namely instilling democratic values through school culture. introduced democratic values will be more effective. Democratic values that can be applied in schools such as through activities: student-centered learning, freedom in choosing the game, awakening democratic sensitivity of students, democratic classroom management. Based on these data, this study proves that democratic values are very important to be instilled in students. The role of teachers in schools as knowledge transformation institutions is responsible for creating a democratic life.*

*Keywords: Teacher's role, values, democracy, culture*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang peranan guru dalam pembelajaran nilai-nilai demokrasi dalam budaya sekolah dasar di Sidoharjo, kabupaten Sragen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui deskriptif kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah dasar kelas VI dimana peneliti mengumpulkan data melalui observasi, interview dan dokumen. Hasilnya, peran guru sangatlah penting yakni menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui budaya sekolah. Nilai-nilai demokrasi yang diperkenalkan akan lebih efektif. Nilai-nilai demokrasi yang dapat diterapkan di sekolah seperti melaluhu kegiatan : pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kebebasan dalam memilih permainan, membangkitkan kepekaan demokratis peserta didik, pengelolaan kelas yang demokratis. Berdasarkan data-data tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa nilai-nilai demokrasi sangat penting ditanamkan pada peserta didik. Peran guru di sekolah sebagai lembaga transformasi ilmu memegang tanggung jawab dalam menciptakan kehidupan berdemokrasi.

**Kata kunci: Peran Guru, nilai, demokrasi, budaya**

## PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai sarana transmisi pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang dapat mengembangkan diri mencapai kepribadian yang matang yang dapat menerima perbedaan ditengah kemajemukan. Guru dapat memunculkan motivasi kepada peserta didik untuk ikut dalam pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang dapat menyapaikan pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang nantinya akan dicontoh oleh peserta didik. Jika guru memberikan contoh atau teladan yang baik, peserta didik akan menirukan gaya dari guru tersebut. Sebaliknya, jika guru tidak memberikan contoh yang baik kepada peserta didik dalam pembelajaran.

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang merupakan ciri khas dari masyarakat demokratis. Nilai merupakan suatu yang berharga, menunjukkan kualitas yang berguna bagi manusia (Isnanda, 2015). Nilai ada sebagai suatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nilai demokrasi harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai nilai demokrasi dianggap baik dan positif oleh warganya. Masih bisa dikatakan lemahnya nilai nilai demokrasi di kalangan pelajar di Indonesia (Abdulkarim, 2007). Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus bully di sekolah, perbedaan ras yang menyebabkan konflik antar peserta didik, kurangnya kesadaran akan pentingnya sikap toleransi antar umat beragama, masih banyaknya tindakan mencontek ketika ujian, dan juga adanya perbedaan hak di lingkungan sekolah.

Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri dengan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya. Salah satu proses pembentukan pribadi melalui pendidikan adalah pendidikan di sekolah dimana unsur terpenting didalamnya selain guru, peserta didik adalah pelajaran yang di peroleh peserta didik disekolah. Nilai-nilai demokrasi di sekolah perlu diterapkan terutama dalam menjalani abad globalisasi. Pada era ini, batas-batas peradaban menjadi benturan antar peradaban, untuk itu sistem pendidikan harus berdiri di atas landasan budaya yang

menggambarkan kondisi masyarakat seperti yang diungkapkan Nicholas Hans (Yoyon, 2011 :2 ) bahwa pendidikan adalah watak nasional suatu bangsa. Hal ini perlu dicanangkan guna mencapai cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan, karena pada hakikatnya pendidikan memberikan kesempatan seseorang untuk memiliki dan menguasai pengetahuan. Namun, setiap orang juga perlu memahami batas-batas dirinya dan orang lain.

Sekolah diyakini mampu menciptakan suatu budaya sekolah yang kondusif. Budaya sekolah menjadi pondasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang digunakan oleh sekolah. Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya sekolahnya sendiri sebagai identitas diri, dan juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolahnya. Menurut Thomas Lickona ( 2013: 437). Dalam sekolah yang baik, juga terdapat komunitas intelektual dan moral yang kuat di kalangan orang dewasa. Sekolah merupakan lingkungan yang cerdas yang dapat mengubah cara berpikir anak. Budaya sekolah akan mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan demikian, perlu belajar nilai-nilai demokrasi sebagai proses pendidikan pada peserta didik seperti yang dikemukakan Djahiri (Sri Hapsari, 2015) yang menyatakan bahwa, pendidikan adalah suatu upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung secara terus-menerus ke arah membina manusia menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya. Nilai-nilai yang dijalankan ini memungkinkan terjalannya kerjasama diantara warga sekolah. Dengan demikian, akan memperkuat daya rekat sosial.

Guru merupakan salah satu elemen yang membantu para peserta didik tidak hanya dalam hal pengetahuan dan keterampilan namun juga penanaman nilai. Guru dalam pelaksanaan pendidikan salah satunya adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkan nilai demokrasi di Negara demokratis dengan bebas namun juga terarah, yang nantinya guru juga akan mengarahkan peserta didik tersebut sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya, mengekspresikan, menulis, dan dapat memecahkan masalah dengan maksimal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena menggunakan analisis non statistik dan mempertimbangkan pendapat-pendapat orang lain yaitu narasumber (Arikunto, 2014). Peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah dasar kelas VI dimana peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dan dokumen untuk mengetahui fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekolah dasar. Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di SD Negeri Singopadu 2 Sidoharjo, kabupaten Sragen. Jumlah peserta didik dalam penelitian ini sebanyak 17 orang, yang terdiri dari 7 laki-laki dan 10 perempuan.

## PEMBAHASAN

### Pembelajaran Demokratis

Belajar adalah proses mengubah perilaku sebagai dampak yang diperoleh oleh panca indra yang relatif permanen. Dalam proses belajar mengajar, itu guru membutuhkan situasi dan kondisi yang mendukung dan kondusif (Ngurah, 2013). Sebagai upaya untuk keluar dari pembelajaran yang bersifat membelenggu tersebut menuju pada pembelajaran yang membebaskan dibutuhkan keterbukaan dan sikap lapang dada dari guru untuk memberikan kesempatan seluasluasnya kepada peserta didik guna mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Di dalam *Concise Oxford English Dictionary*, *Teaching* bisa berarti sebagai berikut:

- *To give systematic information to a person, (about a subject or skill).*
- *To practice this professionally.*
- *To enable a person to do something by instruction and training (to swim, to dance).*
- *To be an advocate for a moral principle (my parent taught me forgiveness).*
- *To communicate, instruct in a moral principle.*
- *To induce a person by example or punishment to do or not to do a thing (that will teach you to sit still; that will teach you not to laugh).*
- *To make a person disinclined to do a thing (I will teach you to interfere)*

Sedangkan menurut Jarwis (2006: 13), seiring dengan perkembangan zaman, guru saat ini tidak lagi: (1) memonopoli dalam hal transmisi pengetahuan; (2) menentukan pengetahuan tetapi mungkin hanya sebagai pemberi makna tentang system pengetahuan yang berbeda; (3) berkaitan dengan kebenaran (*truth*) meskipun mereka jelas mengajarkannya; (4) mengajar dengan pengetahuan yang tidak berubah meskipun sekarang berhadapan dengan pengetahuan ilmiah; (5) merasa nyaman di dalam kelas, tetapi seperti orang asing yang memiliki fungsi ketika peserta didiknya membutuhkan; (6) mengajarkan hanya pengetahuan teoretis tetapi sekarang juga membantu para peserta didik mendapatkan pengetahuan praktis; (7) dapat berasumsi bahwa peserta didiknya tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang materi yang diajarkan tetapi mereka harus belajar untuk membangun pengetahuan yang telah diperoleh peserta didiknya dari beragam sumber.

Peran guru terhadap peserta didik telah diminimalisir, peran peserta didik dalam pembelajaran jauh melebihi peran-peran tradisionalnya dalam himpitan pengajaran model gaya komando. Upaya memaksimalkan peran peserta didik ini sebagai bentuk riil dari misi pembebasan peserta didik dari keterbelengguan akibat penindasan guru. Melalui pembebasan ini, diharapkan peserta didik memiliki kemandirian yang tinggi dalam memberdayakan potensi yang dimiliki untuk berpendapat, bersikap dan berkreasi sendiri. Oleh karena itu, mesti ada dialog. Ciri aksi budaya yang memperjuangkan kebebasan adalah dialog, sedangkan yang mengarah pada dominasi justru anti dialog.

Seiring dengan demokrasi politik. Ada tuntutan demokrasi pendidikan dalam prakteknya berimplikasi pada demokrasi pembelajaran dengan indikasi menciptakan suasana dialogis. Dengan demikian, peranan guru dalam penyampaian pengetahuan menjadi sangat berkurang yang digantikan oleh peranan peserta didik yang semakin menguat. Tuntutan dialog belakangan ini sebagai suatu yang tak terelakkan lagi dalam kehidupan pendidikan demokratis, sekaligus membuktikan adanya pergeseran posisi peserta didik dari posisi objek ke posisi subjek dalam berbagai kesempatan. Bagaimana istilah peserta didik apalagi pembelajar akan selalu mengesankan kondisi aktif pada anak

didik, terdidik maupun objek didik; oleh karena itu, belakangan ini pengertian perencanaan untuk memberi peluang pada peserta didik-peserta didiknya mengembangkan aktivitas belajar, serta mengeksplorasi berbagai pengalaman baru untuk mencapai berbagai kompetensi yang diidealkannya, dan telah menjadi kesepakatan-kesepakatan kelas bersama dengan gurunya. Guru tidak banyak mencampuri mengatur dan menegur pekerjaan anak, akan tetapi membiarkan bekerja menurut kemampuan dan cara masing-masing sikap, hal ini sesuai dengan sistem pembelajaran berpusat pada peserta didik.

### **Hakikat Budaya Sekolah**

Budaya sulit untuk didefinisikan karena itu adalah inti dari siapa kita dan bagaimana kita ada di dunia. Hal ini berasal dari pemahaman yang diperoleh oleh orang melalui pengalaman dan pengamatan tentang bagaimana hidup bersama sebagai sebuah komunitas, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan fisik, pengetahuan, atau keyakinan. Menurut Barret (Etta R, 2008: 18) tentang budaya: "*Culture as the body of learned beliefs, traditions, and guides for behavior that are shared among members of any human society.* Tradisi, norma, dan nilai-nilai yang ada akan mempengaruhi seseorang dalam beraktivitas. Elemen-elemen budaya ini mempengaruhi bagaimana orang berpikir, merasa, dan bertindak. Kepribadian ini menjadi budaya yang diwujudkan dalam perilaku pola masyarakat, menjadi mental maps, dan norma-norma sosial.

Setiap organisasi memiliki budaya, sejarah yang mendasari harapan tidak tertulis yang membentuk segala sesuatu tentang sekolah. Sebuah budaya sekolah mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Mampu untuk memahami dan membentuk budaya adalah kunci keberhasilan sekolah dalam mempromosikan staf dan belajar peserta didik. Saat sekolah memiliki budaya profesional, pengembangan staf yang berarti, sukses mereformasi kurikulum, dan pencapaian prestasi peserta didik, maka budaya ini berkembang dengan baik. Arends (2008:146 ) menekankan pentingnya budaya sekolah karena dapat: menciptakan pengaturan organisasi yang

mempersatukannya dan memberinya kekuatan sebagai sebuah entitas sosial.

Peterson & Deal (2009: 9) mengartikan budaya sekolah sebagai: *the unwritten rules and assumptions, the combination of rituals and traditions, the array of symbols and artifacts, the special language and phrasing that staff and students use, and the expectations about change and learning that saturate the school's world.* Ini adalah harapan tertulis yang dibangun dari waktu ke waktu dari kerjasama antara guru, administrator, orang tua, dan peserta didik. Budaya sekolah selalu berkembang dan tidak pernah statis. Budaya sekolah dapat memberikan dampak pada seluruh elemen sekolah yakni: *School cultures transforming a student culture into one that is characterised by vision, collegiality, trust, values, broad member participation, positive personal and innovation organisational growth, empowerment, and continuous .*

Budaya sekolah bukanlah entitas statis. Hal ini terus-menerus dibangun dan dibentuk melalui interaksi dengan orang lain dan melalui refleksi tentang kehidupan. Budaya sekolah berkembang sebagai anggota staf yang berinteraksi satu sama lain, dengan peserta didik dan masyarakat. Hal ini menjadi panduan perilaku. Dalam hal ini, penting penanaman nilai moral pada peserta didik, seperti sikap hormat. Sikap hormat berarti menunjukkan penghormatan terhadap seseorang atau sesuatu. Dengan adanya sikap hormat maka lahir sopan santun dan tanggung jawab.

Pada sekolah-sekolah, *the nature of human activity* sangat penting, terlebih kita menyaksikan bagaimana ketidakharmonisan antar pelajar. Dengan memiliki dan ditanamkan norma kekeluargaan maka peserta didik pun dapat lebih aman adanya sikap untuk menghargai perbedaan. Arends memandang bahwa budaya sekolah menciptakan pengaturan organisasi yang mempersatukannya dan memberinya kekuatan sebagai sebuah entitas sosial dan nyaman menjalankan kegiatan belajar serta budaya sekolah akan membentuk cara-cara guru, peserta didik, dan administrator dalam berpikir, merasa, dan bertindak.

### **Peran Guru Yang Demokratis dalam Budaya Sekolah**

Pembelajaran demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saja tidak cukup. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti yaitu wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan hasil bahwa penanaman nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang sangat penting bagi warga Indonesia, tak terkecuali peserta didik di SD Negeri Singopadu 2 Sidoharjo. Nilai-nilai demokrasi penting diajarkan sejak dini, karena demokrasi pada peserta didik khususnya di sekolah dasar tidaklah mudah, dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan penanaman nilai-nilai demokrasi ini diharapkan kelak peserta didik mendapatkan pembelajaran untuk menghadapi masa depan sebagai manusia yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kurikulum 2013, pelaksanaan nilai-nilai demokrasi terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nilai demokrasi di Indonesia di kelas VI pada kurikulum 2013 merupakan agenda yang membutuhkan dukungan dari berbagai, satu diantaranya berupa budaya sekolah yang kondusif. Budaya sekolah yang kondusif bagi bersemainya sikap dan perilaku demokratis antara lain ditandai dengan kultur atau budaya sekolah yang humanis. Oleh karena itu, agenda pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dalam rangka penguatan nilai-nilai demokrasi di sekolah salah satunya adalah pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam budaya sekolah antara lain:

### **1. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik**

Demokrasi tidak berarti ketergantungan mutlak pada otoritas. Sebaliknya yaitu individu yang membuat keputusan mengenai diri mereka sendiri sesuai dengan pikiran dan keterampilannya masing-masing. Pembelajaran yang diberikan oleh guru di dalam kelas dianggap oleh kita semua sebagai bentuk pembelajaran yang demokratis karena guru sudah memberikan kewajibannya kepada peserta didik untuk mengajarkan materi ajar.

Selain sikap yang demokratis ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu guru harus mengganti metode pengajaran konvensional dan teknik yang tidak demokratis dengan metode yang berpusat pada peserta didik yang lebih demokratis. Menurut Sugihartono (2007:108) melalui penerapan pembelajaran yang

berpusat pada peserta didik, maka peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.

Contoh konkret yang diterapkan di kelas VI SDN Singopadu 2, misalnya guru menawarkan yang mana yang diinginkan oleh peserta didik ketika merencanakan kegiatan pembelajaran, jadi guru harus mempersiapkan beberapa alternatif kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yang tentu saja tidak terlepas dari materi ajar yang akan diterima oleh peserta didik. Contohnya dalam topik yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan, peserta didik berpartisipasi dan memilih kegiatan sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun kegiatan peserta didiknya berbeda-beda tapi payungnya tetap sama yaitu topik pendidikan lingkungan, baik itu kegiatannya yang dilakukan di dalam kelas, sekolah, ataupun di luar sekolah. Selanjutnya, guru mendengarkan pendapat para peserta didik terkait dengan pembelajaran yang akan/sudah dilakukan oleh mereka, pembelajaran seperti ini adalah kegiatan yang sangat efektif dan demokratis bagi para peserta didik, dan akan memberikan ketenangan serta kebebasan dalam jiwa mereka.

### **2. Kebebasan memilih permainan yang disukai.**

Peserta didik di kelas VI berjumlah 17 yang terdiri 7 laki laki dan 10 perempuan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan permainan jika mereka ingin bermain di sekolah pada jam istirahat, disini guru menyediakan kasus-kasus untuk dipecahkan peserta didik yang berkaitan dengan perbedaan kegemaran bermain. Permainan dapat menolong peserta didik menguasai kecemasan dan konflik, tekanan-tekanan akan terlepaskan di dalam permainan, permainan memungkinkan peserta didik melepaskan energi fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan-perasaan terpendam (Santrock, 2006). Permainan di dalam kelas dapat diterapkan untuk membantu peserta didik memperoleh sikap dan keterampilan yang demokratis.

Wahyuni (2012: 41) mengemukakan permainan dan drama di dalam kelas akan membantu peserta didik dalam memperoleh kebiasaan bertanggung jawab dan akan mendorong peserta didik berpartisipasi serta bekerja secara kolektif. Dampak dari permainan di dalam kelas yaitu peserta didik akan berkembang dalam hal keterampilan secara individu, sosial, serta komunikasi dengan orang lain akan lebih nyaman dan tepat, kemudian akan mengembangkan keterampilan sosial serta akan menumbuhkan sikap demokratis yang luwes.

Dalam permainan di kelas, peserta didik diberikan tugas yang berbeda untuk memainkan perannya, permainan ini bisa menjadi hiburan untuk mereka sekaligus mereka mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan kehidupan yang demokratis. Misalnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan permainan negara demokrasi, yaitu mengonsep kelas menjadi Negara yang didalamnya harus ada pejabat-pejabat yang mengisi jabatan yang telah dikonsep oleh guru, seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, bendahara, dan seksi-seksi yang lainnya.

Apabila peserta didik terpilih sebagai presiden/ketua kelas maka harus bersikap adil, bertanggung jawab, disiplin dan tegas. Sementara itu, untuk jabatan yang lainnya harus memiliki sikap yang terbuka, jujur, pintar mencari solusi, rajin, cekatan, memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan masih banyak kriteria lainnya. Hal itu harus disampaikan dan diperankan peserta didik, supaya peserta didik mampu memahami arti sebuah demokrasi dari sejak dini. Demokrasi adalah sebuah konsep abstrak bagi peserta didik sekolah dasar, demokrasi akan mudah diajarkan dengan cara permainan dan drama.

### **3. Membangkitkan kepekaan demokratis**

Peserta didik di kelas VI diajak oleh guru untuk menafsirkan tempat peristiwa yang berlangsung di seluruh dunia. Hal seperti ini akan membuat mereka lebih tertarik dan menjadi *sensitive* terhadap kejadian di dunia yang lebih besar di sekitar mereka. Mereka harus didorong untuk memahami bagaimana

menjadi sensitif terhadap keadaan di seluruh dunia. Selain itu, mereka harus dididik dengan cara mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok untuk ikut berkontribusi mencari solusi terhadap masalah yang ada di dunia. Misalnya, guru membantu peserta didik dalam mencari acara sosial yang terjadi secara lokal maupun global melalui surat kabar, majalah, dan televisi.

Kemudian, guru mengalokasikan sebagian waktu dari mata pelajarannya untuk mengevaluasi kegiatan sosial tersebut. Kesadaran demokrasi dapat ditingkatkan dengan cara menghasilkan pendapat sendiri untuk memecahkan masalah sosial yang dikhawatirkan oleh mereka. Gaudelli dan Fernekas (2004) mengemukakan tingkat sensitivitas peserta didik terhadap masalah nasional dan hak asasi manusia sangat tinggi, jadi tugas guru adalah memberikan sejumlah pertanyaan mengenai masalah tersebut, supaya muncul sikap demokratis peserta didik.

Selain itu Peserta didik diajak untuk menyelesaikan tugas secara kelompok, kemudian guru mengajak peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat kelompok lain dengan baik tanpa ada perdebatan yang sengit yang mengakibatkan pertengkaran diantar kelompok. Disinilah peran guru sebagai penengah. Tidak hanya diberikan cara-cara berbicara dan berpendapat, guru juga menunjukkan bagaimana cara-cara mengambil keputusan dan menerima hasil keputusan.

### **4. Pengelolaan kelas yang demokratis**

Dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi guru dapat menjadi *role model*, hal ini berarti segala perilakunya dapat menjadi tauladan bagi peserta didik dalam pembentukan karakter demokratis dalam dirinya. Jika di dalam kelas tidak beriklim demokrasi, maka dalam diri peserta didik tidak akan tertanam sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Rosyada (2004:19) menyatakan bahwa, “sekolah bukan menjadi tempat pertunjukan bagi guru tetapi tempat bagi peserta didik untuk menambah dan memperkaya

pengalaman belajarnya”. Oleh sebab itu, guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang memberi peluang bagi peserta didik untuk belajar. Inilah makna lain dari sekolah demokratis, yaitu sekolah itu untuk peserta didik bukan untuk guru. Sekolah harus menjadi rumah kedua bagi peserta didik, mereka betah menghabiskan waktunya di sekolah, dengan belajar, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca, dan melakukan aktivitas lainnya. Implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran di kelas tentu tidak lepas dari peran guru. Guru harus menciptakan suasana yang hangat di sekolah sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik.

Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang demokratis dan manajemen kelas yang baik akan memengaruhi guru dan peserta didiknya dalam berbuat positif dalam segala hal (Taylor, 1993). Sikap dan perilaku guru dalam mengelola kelas merupakan salah satu faktor yang paling penting yang dapat memengaruhi sikap demokratis peserta didik. Tindakan seperti membuat aturan dalam pengelolaan kelas, menumbuhkan ide kreatif peserta didik, dan memperlakukan semua peserta didik sama di kelas, dapat memengaruhi sikap demokratis peserta didik. Guru di kelas VI SDN Singopadu 2 menyepakati peraturan di kelas dengan peserta didik, yaitu dengan cara setiap peserta didik di kelasnya menulis aturan untuk ditaati, kemudian aturan itu bisa jadi sebuah penilaian bagi komitmen peserta didik terhadap aturan yang telah ditulis oleh mereka. Guru pun menyampaikan bahwa aturan ini harus dipedomani oleh seluruh peserta didik, hal seperti ini merupakan bagian dari kehidupan yang demokratis.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Nilai Demokrasi**

Penerapan nilai demokrasi ini juga memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalamnya. Faktor pendukung dari penerapan nilai demokrasi di kelas ini adalah lingkungan sekolah akan mempermudah peserta didik dan guru dalam menerapkan nilai dan sikap demokratis, sebab dengan adanya kebebasan dalam lingkungan sekolah dalam hal berpendapat

akan membuat peserta didik terbiasa akan nilai-nilai demokrasi. Persamaan hak di kelas juga membuat anak jadi bisa merasa dihargai dan dihormati walaupun banyak perbedaan mulai dari ras, suku, bahkan agama (Rini, 2017). Faktor penghambat dalam penerapan nilai demokrasi ini juga banyak, membuat peserta didik tidak sepenuhnya dapat menerapkan nilai nilai demokrasi yang telah diajarkan. Lingkungan keluarganya yang kurang mendukung juga menjadi salah satu alasan mengapa siswa tidak bisa sepenuhnya menerapkan nilai demokrasi yang ada.

Guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada para peserta didiknya yaitu selalu menghargai pendapat peserta didiknya jika ada yang tidak setuju dengan pendapatnya, menjalankan peraturan, tidak memberikan hukuman yang berat kepada peserta didiknya, memperlakukan peserta didiknya dengan adil tanpa ada rasa pilih kasih. Kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam Pendidikan guna mencetak para peserta didik untuk lebih bisa menjadi pribadi yang demokratis sesuai dengan yang diharapkan. Bila ada konflik, pemimpin bisa melakukan dialog transformatif (Gultom, 2010). Kualitas suatu sekolah juga tergantung pada bagaimana cara kepala sekolah itu memimpin.

### **KESIMPULAN**

Fungsi utama dari pendidikan dasar salah satunya adalah untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Peran guru sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Sekolah sebagai lembaga transformasi ilmu memegang tanggung jawab dalam menciptakan kehidupan berdemokrasi.

Pembelajaran demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saja tidak cukup. Budaya sekolah yang kondusif merupakan faktor yang mendukung tercapainya nilai-nilai demokrasi di Sekolah. Dalam proses ini, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap dan perilaku demokratis peserta didik, yaitu (1) pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; (2) membantu peserta didik memperoleh kesadaran demokrasi dengan permainan di kelas; (3) mengembangkan

kesadaran demokratis peserta didik; dan (4) pembentukan lingkungan kelas yang demokratis.

Guru harus mempunyai wawasan serta kemampuan yang kompeten dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dan melaksanakan tugas-tugasnya di masyarakat. Guru juga harus termotivasi untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi peserta didik untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, A. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.
- Bogdan, Taylor Steven J. 1993. *Kualitatif: Dasar - Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gultom, A. F. 2010. *Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan*. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 4(2), hlm 279-289.
- Hollins, Etta R. 2008. *Culture in School Learning*. London: Routledge.
- Isnanda, R. 2015. Struktur dan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal gramatika*, 1(2), 79730.
- Kaelan. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma
- Lesilolo Herly Janet. 2015. *Kebebasan Peserta didik Dalam Budaya Demokratis Di Sekolah*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 3, No 1, hlm 11-18.
- Lickona, Thomas. 2013. *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Peserta didik menjadi Pintar dan Baik*. Penerjemah Lita S. Bandung: Nusa Media
- Paramita, Tera. 2015. *Implementasi Sikap Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahapeserta didik Ikip Pgri Pontianak*. Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 2, No. 2, hal 173-182
- Peterson, Kent D.; Deal, Terrence E. 2009. *The Shaping School Culture Fieldbook. Second Edition*. San Francisco: Jossey-Bass.
- R.I. Arends. 2008. *Learning To Teach Belajar untuk Mengajar*, terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rini, N. D. A. 2017. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol 3, nomor 3 hlm 164-168.
- Setiadi, Elly M; Hakam, H. Kama A; Effendi, Ridwan. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sri Hapsari Telaah Teoritis: *Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Budaya Sekolah Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015, hlm 184-193.
- Sudja, I Nengah. 2013. *Pembelajaran Demokratis Menuju Profesionalisme Guru*. Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 3, Nomor 2, Juli 2013 hal 2013-225.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wahyuni, S. 2012. *Asesmen Pembelajaran Bahasa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wina Dwi Puspitasari. 2016. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Di Sekolah Dasar*. Proseding seminar nasional UPI bandung, vol 2, hlm 244-249
- Yoyon Bahtiar Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers